

Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radars Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kota Semarang

Halaman 13 dan 22

Penertiban Bangunan Tambakrejo Harus Dilakukan

Normalisasi Banjir Kanal Timur

SEMARANG - Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang, meminta Pemkot Semarang untuk menyampaikan perkembangan terakhir terkait penyelesaian proyek normalisasi Banjir Kanal Timur.

Khususnya berkaitan dengan penertiban sejumlah bangunan yang menempati lahan di bantaran Banjir Kanal Timur di wilayah Kampung Tambakrejo, Kelurahan Tanjungmas, Semarang Utara. "Proses penertiban bangunan di Tambak-

rejo telah sesuai prosedur. Kami bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana melakukan pembongkaran bangunan pada 9 Mei. Kegiatan penertiban perlu dilaksanakan dalam rangka mengatasi banjir yang melanda

kawasan timur Kota Semarang," kata Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi saat menggelar audiensi dengan DP2K di Gedung Menara Suara Merdeka lantai 17, Kamis (23/5).

Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, menyampaikan, sekitar 5.000 bangunan yang berada di sepanjang bantaran Banjir Kanal Timur telah ditertibkan sejak Januari 2018. Terkait dengan hal itu, pihaknya berkali-kali menggelar kegiatan sosialisasi dan men-

cari solusi mengatasi permasalahan itu bersama warga setempat.

Batasan waktu pindah hingga 19 Februari 2019 dan relokasi telah diberikan kepada warga di Rusunawa Kudu dan Trimulyo. Warga digratiskan tinggal selama setahun di sana, namun keputusan tersebut tetap ditolak.

"Hal yang menyulitkan, mereka tinggal di bantaran Banjir Kanal Timur tanpa disertai bukti surat kepemilikan tanah," imbuh dia.

(Bersambung
hlm 22 kol 1)

Proses mediasi pada akhir 2018 yang melibatkan Komnas HAM, warga Tambakrejo, BBWS, dan Pemkot pun telah digelar. Pemberian Surat Peringatan (SP) telah dilakukan hingga tiga kali, tapi warga masih enggan pindah. "Prosesnya telah mengalami kemunduran dari waktu yang ditentukan, akhirnya penertiban terpaksa dilaksanakan."

Menurut Hendi, berdasarkan proses mediasi, sebenarnya warga telah menyepakati untuk menerima pemberian tali asih sebesar Rp1,5 juta per keluarga. Selain itu, sebagian dari mereka kemudian memilih untuk menempati Hunian Sementara (Huntara) dibandingkan menempati Rusunawa. Proses pengurangan tanah telah dilakukan di lahan seberang pemukiman mereka tinggal sebelumnya.

Pemotongan Biaya Proyek

Selain proses ini, pihaknya juga menyampaikan rencana perkembangan Kota Semarang yang lainnya. Seperti pembangunan Simpanglima bawah tanah dan LRT.

"Kami telah menganggarkan DED pada September 2019 untuk pembangunan Kampung Nelayan. Nantinya, warga di Huntara akan dipindah ke sana untuk tempat tinggal mereka," tambah dia.

Sementara itu, Kepala BBWS Pemali Juana, Ruhban Rozziyatno mengatakan, akibat keterlambatan tersebut pihaknya harus menanggung akibat pemotongan biaya proyek sebesar Rp 27 miliar. Proses normalisasi Banjir Kanal timur, kata dia, akan berlanjut kepada tahap kedua yang menasar daerah Pucang Gading, Semarang. Pihaknya juga telah melaksanakan pemeliharaan rutin tahunan diikuti dengan perbaikan di sejumlah titik yang mengalami kerusakan.

"Untuk mencegah banjir di wilayah timur Kota Semarang, kami telah membuka lima pintu air di Pucanggading. Jika nantinya elevasi sungai di Pucanggading mencapai lebih dari satu meter, maka wilayah timur Kota Semarang akan kebanjiran. Hal yang sama juga diberlakukan di Kali Sayung dan Kali Babon," papar Ruhban.

Kegiatan audiensi tersebut juga dihadiri Ketua Umum DP2K Semarang, Ir Budi Santoso, serta anggota DP2K yakni Sasongko Tedjo, Adi Eko Priyono, Rektor Udinus Prof Edi Nur Sasongko, dan sejumlah kepala OPD terkait yang ada di Pemkot

Semarang.

Sementara itu, Sekretaris DP2K, Prof Dr Ir Nany Yuliasuti menyampaikan, bersama dengan anggota DP2K telah mengunjungi Kota Makassar dan memberikan masukan terkait rencana penerapan *Waterfront City* jika ingin diterapkan di Kota Semarang.

"Hal yang perlu diperhatikan adalah terkait pembebasan lahan dan kawasan yang akan digunakan untuk penerapan itu di Kota Semarang nantinya. Termasuk, nantinya juga dalam hal pengaturan kawasan pertokoan di Simpanglima bawah tanah," ujar dosen Undip tersebut. (ary-48)